



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DINAS SOSIAL,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2012**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategy (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra SKPD dan Renja SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program / kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Harapan kami semoga LAKIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2012

**KEPALA DINAS
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN**



Dr. IMAM TRISNO EDY, MM.

Pembina Utama Muda.

NIP. 19590407 198503 1 015.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan melaporkan Capaian Kinerja selama Tahun 2011 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015 yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011 yang terimplementasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kinerja Tahun 2011. Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011.

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011 dijelaskan bahwa " Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2011 " dengan tetap merujuk pada Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 - 2015, diantaranya adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4. Program transmigrasi

Untuk melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan 5 (lima) Tujuan, 17 (tujuh belas) Sasaran 10 (sepuluh) Program dan 47 (empat puluh tujuh) Kegiatan sumber anggaran pendapatan dalam APBD Tahun 2011 (Anggaran Perubahan) sebesar Rp. 1.720.600.000,- secara umum masing-masing program dan kegiatan telah tercapai dengan baik dan sesuai target, namun demikian masih terdapat capaian kinerja yang belum sepenuhnya berhasil memenuhi target kinerja RPJMD 2010-2015, sebagaimana beberapa Skala Prioritas Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2011 antara lain :

1. Rasio Pencari Kerja yang ditempatkan mengalami turun 0,12 % yaitu dengan capaian sebesar 26,90 % dibandingkan target sebesar 27,02 %, disebabkan semakin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A LATAR BELAKANG	1
B TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A RENCANA STRATEJIK	10
1. Visi	
2. Misi	
3. Tujuan	
4. Sasaran	
B RENCANA KINERJA	19
1. Sasaran dan Indikator Sasaran	
2. Program	
3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan	
C PERJANJIAN KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A PENGUKURAN KINERJA	25
B EVALUASI KINERJA	33
C ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	35
D AKUNTABILITAS KEUANGAN	36
BAB V PENUTUP	40
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
➤ Rencana Strategik (RS)	
➤ Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	
➤ Penetapan Kinerja (PK)	
➤ Pengukuran Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan merupakan penggabungan dari Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Dinas Sosial sejak bulan Januari Tahun 2009.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.

Sehubungan dengan keberadaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan, maka tiap akhir tahun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasar pada :

- TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersis dan Bebas KKN.
- Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP.
- Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja.
- Perda Kaabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010 -2015.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategi di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
4. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan disusun dalam struktur organisasi terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
 - 2.1. Sub Bagian Umum.
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan.
 - 2.3. Sub Bagian Program.
3. Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial.
 - 3.1. Seksi Bina Swadaya dan Penyuluhan.
 - 3.2. seksi Perlindungan Sosial.
 - 3.3. Seksi Pemberdayaan Panti Sosial Kepahlawanan dan Kejuangan.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial.
 - 4.1. Seksi Rehabilitasi Penyakit Sosial dan Lanjut Usia.
 - 4.2. Seksi Rehabilitasi Bencana dan Daerah Kumuh.
 - 4.3. Seksi Bantuan Sosial.

5. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - 5.1. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja.
 - 5.2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - 5.3. Seksi Transmigrasi.
6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
 - 6.1. Seksi Nourma Kerja.
 - 6.2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 6.3. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS

**KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL**

SEKRETARIAT

**SUB BAGIAN
UMUM**

**SUB BAGIAN
KEUANGAN**

**SUB BAGIAN
PROGRAM**

**BIDANG BINA
SWADAYA DAN
PERLINDUNGAN
SOSIAL**

**BIDANG
REHABILITASI
SOSIAL**

**BIDANG
PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI**

**BIDANG
PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
DAN HUB.
INDUSTRIAL**

**SEKSI
BINA SWADAYA
DAN PENYULUHAN**

**SEKSI
REHABILITASI
PENYAKIT SOSIAL
DAN LANJUT USIA**

**SEKSI
PERLUASAN DAN
PENEMPATAN
TENAGA KERJA**

**SEKSI
NORMA KERJA**

**SEKSI
PERLINDUNGAN
SOSIAL**

**SEKSI
REHABILITASI
BENCANA DAN
DAERAH KUMUH**

**SEKSI
PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA**

**SEKSI
KESELAMATAN
DAN KESEHATAN
KERJA**

**SEKSI
PEMBERDAYAAN
PANTI**

**SEKSI
BANTUAN SOSIAL**

**SEKSI
TRANSMIGRASI**

**SEKSI
HUB. INDUSTRIAL
& PERSYARATAN
KERJA**

UPTD

1. Personil

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan didukung oleh 49 orang, yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan Doktor (S3).

NO	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KET
1	Kepala Dinas	1	Pembina Utama Muda IV.c	1	S.3	1	
2	Sekretaris	1	Pembina I IV.a	1	S.2	1	
3	Kepala Bidang	4	Pembina Tk. I IV.b	3	S.2	2	
					S.1	1	
			Pembina IV.a	1	S.1	1	1 Pensiun 1-Nop-2011
4	Kepala Seksi	15	Pembina IV.a	1	S.2	1	
			Penata Tk. I III.d	9	S.2	2	
					S.1	4	
					D.3	2	1 Pensiun 1-Okt-2011
					SLTA	1	1 Pensiun 1-Okt-2011
			Penata III.c	4	S.2	2	
					S.1	2	
			Penata Muda Tk. I III.b	1	S.1	1	
5	Staf	28	Penata Tk. I III.d	2	S.2	1	
					S.1	1	1 Mutasi
			Penata III.c	3	S.1	2	
					D.3	1	
			Penata Muda Tk. I III.b	8	SLTA	8	
					S.1	8	
			Penata Muda III.a	10	S.1	8	
					SLTA	2	
			Pengatur II.c	2	D.3	1	
					SLTA	1	
			Pengatur Muda II.a	2	SLTA	2	
			Tenaga Kontrak	2	S.1	2	
JUMLAH		49		49		49	

Tabel I : Data Kepegawalan Tahun 2011

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana tabel II.

NO	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET
1	Mobil	Buah	4	
2	Sepeda Motor	Buah	23	
3	Lemari Besi	Buah	3	
4	Lemari Kaca	Buah	3	
5	Lemari Kayu	Buah	6	
6	Rak Besi	Buah	3	
7	Rak Kayu	Buah	1	
8	Filling Besi	Buah	7	
9	Papan Pengumuman	Buah	2	
10	White Board	Buah	2	
11	Overhaed Proyektor	Buah	1	
12	Meja Kayu / Rotan	Buah	1	
13	Meja Rapat	Buah	1	
14	Meja Tulis	Buah	7	
15	Meja Telephon	Buah	1	
16	Meja Podium	Buah	1	
17	Kursi Tamu	Buah	3	
18	Kursi Lipat	Buah	136	
19	Meja Komputer	Buah	1	
20	Mesin Penghisap Debu	Buah	1	
21	Mesin Potong Rumput	Buah	2	
22	AC	Buah	7	
23	Kipas Angin	Buah	5	
24	Mesin Ketik	Buah	8	
25	Radio	Buah	3	
26	Televisi	Buah	4	
27	Komputer	Buah	13	
28	Lap Top	Buah	3	
29	Printer	Buah	4	
30	Meja Kerja Eselon II	Set	1	
31	Meja Kerja Eselon III	Set	5	
32	Meja Kerja Eselon IV	Set	15	
33	Kursi Putar Staf	Buah	22	
34	Pesawat Telephon	Buah	1	
35	Facsimile	Buah	1	
36	Camera Digital	Buah	1	
37	Handy Cam	Buah	1	

Tabel II : Data Sarana dan Prasarana Tahun 2011

3. Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET.
I.	Belanja Daerah	Rp. 4.418.899.000,-	
1.	<u>Belanja Tidak Langsung</u> Belanja Pegawai	Rp. 2.253.465.000,- Rp. 2.253.465.000,-	
2.	<u>Belanja Langsung</u> a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	<u>Rp. 2.165.434.000,-</u> Rp. 238.024.000,- Rp. 1.906.360.000,- Rp. 21.050.000,-	

Tabel III : Data Keuangan Sumber Dana dari APBD Tahun 2011.

C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEJIK

1. Kesosialan.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan menerima pelimpahan wewenang kegiatan bidang sosial, penyediaan sarana dan prasarana sosial, penanggulangan korban bencana dan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial yang selama ini masih dirasa kurang tersentuh.

Namun demikian Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan masih memerlukan dukungan dana untuk pembangunan fisik maupun pembangunan mental manusia seutuhnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan masih perlu mengalokasikan dana untuk menyelenggarakan urusan wajib dibidang sosial.

2. Ketenagakerjaan.

Permasalahan ketenagakerjaan secara umum masih ditandai dengan rendahnya kualitas tenaga kerja, baik dari segi pendidikan formal maupun ketrampilannya. Hal ini mengakibatkan produktivitas tenaga kerja menjadi rendah.

Disisi lain, tuntutan pasar kerja dan persaingan industri di pasar global membutuhkan kemampuan tenaga kerja yang tinggi, dimana penggunaan teknologi dan informasi pada sebagian besar industri menuntut kebutuhan tenaga kerja profesional yang memenuhi standar kualifikasi tenaga kerja berbasis knowledge, skill dan attitude (KSA), serta sosial skill (ketrampilan sosial). Pasar kerja di masa datang juga menuntut adanya jaminan kondisi iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan harmonis yang dapat melahirkan suasana hubungan industri yang ramah dan adanya kepastian hukum dalam usaha dan investasi.

Isu-isu strategis di bidang ketenagakerjaan lainnya antara lain, terbatasnya kesempatan kerja, kemampuan atau skill tenaga kerja yang tidak memadai, kurang modal dan sarana pemasaran untuk industri rumah tangga serta masih kurangnya investasi di Lamongan.

3. Ket transmigrasian.

Penduduk merupakan sumber daya yang paling penting dan berharga bagi setiap bangsa negara dan daerah, bidang transmigrasi dalam hal ini sebagai salah satu jenis mobilitas penduduk diharapkan dapat menjadi salah satu usaha untuk mempererat hubungan antar suku bangsa dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Dalam konteks mobilitas penduduk melalui transmigrasi ini tidak lepas akan melibatkan dua pemerintah daerah yang saling kerja sama, mengingat tingginya minat / animo masyarakat untuk bertransmigrasi dengan mekanisme dan prosedur kerja sama.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK

1. Visi :

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan. Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan arah langkah kedepan dengan penuh kepastian. Visi mampu merupakan gambaran konseptual tentang hari depan yang ingin diwujudkan dan mampu menyemangati.

Bertumpu pada konsep visi tersebut, Kabupaten Lamongan menetapkan visi “ **Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing** “

Visi Kabupaten Lamongan tersebut, tidak akan bisa terwujud dan diwujudkan manakala tidak didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karenanya setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan harus pula menetapkan visi yang seiring dan sejalan dengan visi Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mengacu pada visi Kabupaten Lamongan dan Tugas Pokok Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merumuskan dan menetapkan visi sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL, TERCIPTANYA TENAGA KERJA YANG BERKUALITAS, KESEMPATAN KERJA, HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS, PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG BERKEADILAN DAN MOBILITAS PENDUDUK YANG MANDIRI “

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan dan daya saing yang tinggi menuju “ **Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing** “

Keunggulan ini dapat diwujudkan mempersyaratkan adanya potensi dan kompetensi untuk bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh kembang yang semakin dinamis dan komplek. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing manfaat (*comparative and advantage competitive*) untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat.

Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya "Sense of responsibility and professionally" dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing. Sense of responsibility, menghendaki setiap pelaku kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sementara professionally lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

2. Misi :

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi dapat terwujud apabila Instansi Pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi masalah dan kendala yang dihadapi.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan mempunyai MISI sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipasif dan Transparan.
- 2) Meningkatkan Pemberdayaan Kualitas Keluarga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.
- 3) Meningkatkan Kualitas tenaga Kerja dan Kesempatan kerja.
- 4) Meningkatkan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- 5) Meningkatkan Mobilitas Penduduk dalam mewujudkan pemerataan penduduk.

3. Tujuan :

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan tujuan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang diserahkan kepada SKPD. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana berikut :

- 1) Misi 1 (Satu) "Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipasif dan Transparan", ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun kedepan sebagai berikut : **Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan, sumber daya dan manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.**

- 2) Misi 2 (Dua) "Meningkatkan Pemberdayaan Kualitas Keluarga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya", ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun kedepan sebagai berikut : **Meningkatnya kualitas kehidupan warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.**
- 3) Misi 3 (Tiga) "Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan kerja", ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun kedepan sebagai berikut : **Meningkatnya Peluang Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja.**
- 4) Misi 4 (Empat) "Meningkatkan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja ", ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun kedepan sebagai berikut : **Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Perlindungan Tenaga Kerja yang berkeadilan.**
- 5) Misi 5 (Lima) "Meningkatkan Mobilitas Penduduk dalam mewujudkan pemerataan penduduk", ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun kedepan sebagai berikut : **Meningkatnya Kualitas Kehidupan Penduduk untuk mencapai Kemandirian.**

4. Sasaran

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan ditindaklanjuti dengan renstra SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mencapai tujuan "**Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan, sumber daya dan manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi**" ditetapkan sasaran sebagai berikut :
 - a) Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator :
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan alat cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
- b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator :
- Pembangunan gedung kantor
 - Pengadaan mobil jabatan
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan mebeleur
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- c) Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur, dengan indikator :
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
 - Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

- Pendidikan dan pelatihan formal
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- d) **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikator :**
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 2) **Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya kualitas kehidupan warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial” ditetapkan sasaran sebagai berikut :**
- a) **Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan indikator :**
- Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
 - Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
 - Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
 - Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- b) **Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan indikator :**
- Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
 - Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
 - Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
 - Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.
- c) **Pembinaan Anak Terlantar, dengan indikator :**

- Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, dan perdagangan perempuan dan anak
 - Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 - Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
 - Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana
 - Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya - upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
 - Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- d) Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan indikator :
- Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
 - Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
 - Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
 - Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
 - Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
- e) Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, dengan indikator :
- Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwan
 - Pendidikan dan pelatihan bagi penyandangcacat dan eks trauma.
 - Pendayagunaan para penyandang cacatdan eks trauma.
- f) Pembinaan eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), dengan indikator :
- Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo.
 - Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo.
 - Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo.

- Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.
- Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik.
- g) **Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**, dengan indikator :
 - Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.
 - Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.
- 3) Untuk mencapai tujuan **"Meningkatnya Peluang dan Perluasan Kesempatan kerja"** ditetapkan sasaran sebagai berikut :
 - a) **Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**, dengan indikator :
 - Pembangunan balai latihan kerja.
 - Pengadaan peralatan pendidikan pelatihan dan keterampilan bagi pencari kerja.
 - Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
 - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK.
 - Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK.
 - b) **Peningkatan Kesempatan Kerja**, dengan indikator :
 - Penyusunan informasi bursa tenaga kerja.
 - Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.
 - Penyiapan tenaga kerja siap pakai.
 - Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.
 - Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat.
- 4) Untuk mencapai tujuan **"Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Perlindungan Tenaga Kerja yang berkeadilan"** ditetapkan sasaran sebagai berikut :
 - a) **Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**, dengan indikator :
 - Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
 - Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perelihan hubungan industrial

- Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
 - Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
 - Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
 - Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja
 - Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
- 5) Untuk mencapai tujuan **"Meningkatnya Kualitas Kehidupan Penduduk untuk mencapai Kemandirian"** ditetapkan sasaran sebagai berikut :
- a) Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan indikator :
- Penguatan SDM pemerintah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
 - Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka penambahan kawasan transmigrasi
 - Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
 - Penyediaan lembaga keuangan daerah yang membantu modal usaha di kawasan transmigrasi
 - Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
- b) Transmigrasi Lokal, dengan indikator :
- Penyuluhan transmigrasi lokal
 - Pelatihan transmigrasi lokal
- c) Transmigrasi Regional, dengan indikator :
- Penyuluhan transmigrasi regional
 - Pelatihan transmigrasi regional

B. RENCANA KINERJA

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

- 1) Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja, dengan indikator :
 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 - Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
- 2) Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial, dengan indikator :
 - Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
 - Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial
- 3) Terselenggaranya pelayanan, dengan indikator :
 - Transmigrasi Swakarsa

2. Program

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 3) Program Pembinaan Anak Terlantar
- 4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- 5) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
- 6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 7) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- 8) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 9) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- 10) Program Transmigrasi Regional

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

- 1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya, dengan indikator :

- a. Jumlah yang mengikuti rapat koordinasi UPPKH di Tk. Kabupaten dan Kecamatan
- b. Jumlah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 2) Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial yang Berasal dari Pemerintah dan Masyarakat, dengan indikator :
 - a. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan ketrampilan
- 3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan indikator :
 - a. % Jumlah TKSK yang mengirimkan data PMKS
- 4) Kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia, Terlantar dan Fakir Miskin serta Keluarga Muda Mandiri, dengan indikator :
 - a. Jumlah lanjut usia yang mengikuti bimbingan dan telah mendapat bantuan
- 5) Kegiatan Pemulangan / Pengiriman Kepanti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yang terjaring Rasia, dengan indikator :
 - a. Jumlah wts, gepeng psikotik yang dipulangkan kedaerah asal
- 6) Kegiatan Pemulangan Orang Terlantar Kehabisan Bekal, Kecopetan, Bantuan Transport Pengiriman Anak / Remaja dan Penyandang ke Panti Rehabilitasi Sosial, dengan indikator :
 - a. Jumlah orang terlantar yang dipulangkan dan pengiriman anak remaja dan paca ke panti resos
- 7) Kegiatan Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan bagi Anak Bermasalah, dengan indikator :
 - a. Jumlah anak jalanan yang telah mendayagunakan ketrampilannya
- 8) Kegiatan Pemberdayaan Anak Asuh Keluarga Miskin, dengan indikator :
 - a. Jumlah anak asuh yang telah mendapat sarana dan prasaran sekolah
- 9) Kegiatan Bimbingan Sosial bagi Eks Kusta, dengan indikator :
 - a. Jumlah eks. Penderita kusta yang mendapat binaan dan bimbingan
- 10) Kegiatan Operasional Pendampingan Pendataan Dana Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat, dengan indikator :

- a. Jumlah orang pendamping yang mengikuti rapat koordinasi
 - b. Jumlah penyandang cacat berat yang telah didata dana jaminan sosial
- 11) Kegiatan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat (KUBE PACA), dengan indikator :
- a. Jumlah KUBE PACA yang dibina
- 12) Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo, dengan indikator :
- a. Jumlah orsos/panti
 - b. Jumlah anak asuh didalam panti
- 13) Kegiatan Pemberdayaan Lansia Gerantologi dan Revitalisasi Karang Taruna, dengan indikator :
- a. Jumlah Karang Taruana yang mengikuti revitalisasi
- 14) Kegiatan Pemberdayaan dan Revitalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dengan indikator :
- a. Jumlah PSM yang mengikuti revitalisasi
- 15) Kegiatan Pendidikan dan Ketrampilan Kerja bagi Kelompok Masyarakat di Wilayah Tembakau, dengan indikator :
- a. Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ketrampilan
- 16) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Las bagi Pencari Kerja, dengan indikator :
- a. Jumlah yang mengikuti pelatihan ketrampilan Las
- 17) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja / Job Market Fair, dengan indikator :
- a) % Penyebarluasan Informasi Kesempatan Kerja di Perusahaan
 - b) % Penyebarluasan Informasi bagi Pencari Kerja di Perusahaan
- 18) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Pelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal bagi TKI Purna, dengan indikator :
- a. % Peningkatan Pembinaan Usaha Kecil di Pedesaan bagi TKI Purna

- 19) Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Wilayah Tembakau, dengan indikator :
 - a. % Peningkatan Pembinaan ketrampilan kerja
- 20) Kegiatan Pembentukan Kelompok Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI), dengan indikator :
 - a. Jumlah Kelompok UMSI
- 21) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK), dengan indikator :
 - a. %Tingkat kesempatan kerja
 - b. % Peningkatan TKI yang ditempatkan keluar negeri
- 22) Kegiatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan indikator :
 - a. % Indek jumlah kecelakaan kerja di dalam perusahaan
 - b. % Jumlah sengketa kasus tenaga kerja yang diselesaikan
 - c. % Peningkatan UMK
- 23) Kegiatan Perlindungan Tenaga Kerja Wanita, dengan indikator :
 - a. % Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja Wanita
- 24) Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional, dengan indikator :
 - a. Penyuluhan tentang Kerja sama Antar Daerah dan Pemberangkatan Transmigrasi
- 25) Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Regional, dengan indikator :
 - a. Pelatihan Ketrampilan Calon Transmigrasi
- 26) Kegiatan Kunjungan Kerjasama dalam rangka penempatan transmigrasi, dengan indikator :
 - a. Terlaksananya Kerja sama Antar Daerah Penempatan Transmigrasi

C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja / Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2011 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan dalam tahun 2011 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2011 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2010 – 2015.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran pada Penetapan Kinerja Tahun 2011 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.



BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. PENGUKURAN KINERJA**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Strategik (RENSTRA – Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015) yang telah dicantumkan indikator sasaran dan kinerjanya.

Indikator tersebut adalah merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan, dengan memperhitungkan indikator masukan (**input**), keluaran (**output**) dan hasil (**outcome**), dengan **Skala Pengukuran Ordinal**, sebagai berikut :

85 – 100	= Sangat Baik / Sangat Berhasil.
70 – 85	= Baik / Berhasil.
55 - < 70	= Kurang Baik / Kurang Berhasil.
< 55	= Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil

1) Evaluasi hasil-hasil dan kinerja inputs, outputs dan outcomes.

- a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan alokasi dana sebesar Rp. 121.750.000,- untuk Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya, jumlah yang mengikuti rapat koordinasi UPPKH di Tingkat Kabupaten sebanyak 17 Kecamatan dan jumlah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 29.891 KK dan Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial yang Berasal dari Pemerintah dan Masyarakat, jumlah masyarakat yang menerima bantuan 30 orang (3 kelompok), dan terealisasi keuangan

sebesar Rp 99.646.675,- atau 99,65 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp. 59.000.000,- untuk Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia, Kegiatan Terlantar dan Fakir Miskin serta Keluarga Muda Mandiri, Kegiatan Pemulangan / Pengiriman Kepanti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yang terjaring Rasia, Kegiatan Pemulangan Orang Terlantar Kehabisan Bekal, Kecopetan, Bantuan Transport Pengiriman Anak / Remaja dan Penyandang ke Panti Rehabilitasi Sosial, dan terealisasi keuangan sebesar Rp 58.780.000,- atau 99,63 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c) Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan alokasi dana sebesar Rp. 126.250.000,- untuk Kegiatan Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan bagi Anak Bermasalah, Kegiatan Pemberdayaan Anak Asuh Keluarga Miskin, dan terealisasi keuangan sebesar Rp 123.542.150,- atau 97,86 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial.
- d) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- untuk Kegiatan Bimbingan Sosial bagi Eks Kusta, Kegiatan Operasional Pendampingan Pendataan Dana Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat, Kegiatan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat (KUBE PACA), dan terealisasi keuangan sebesar Rp 29.700.000,- atau 99,00 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial
- e) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo dengan alokasi dana sebesar Rp. 681.600.000,- untuk Kegiatan Operasional dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo, jumlah 30 orsos/panti dan Jumlah anak asuh didalam panti 1250 anak dan terealisasi keuangan sebesar Rp 681.104.992,- atau 99,93 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai jumlah Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.

- f) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,- untuk Kegiatan Pemberdayaan Lansia Gerantologi dan Revitalisasi Karang Taruna, jumlah Karang Taruna yang mengikuti revitalisasi 27 Kecamatan (81 orang) dan Kegiatan Pemberdayaan dan Revitalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), jumlah PSM yang mengikuti revitalisasi 54 orang dan terealisasi keuangan sebesar Rp 681.104.992,- atau 99,93 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai jumlah Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.
- g) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan alokasi dana sebesar Rp. 250.750.000,- untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Kelompok Masyarakat di Wilayah Tembakau, jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ketrampilan 48 orang / 3 kegiatan(1 kegiatan pelatihan Servise sepeda motor = 16 orang dan 2 kegiatan pelatihan menjahit = 32 orang) dan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Las bagi Pencari Kerja, jumlah yang mengikuti pelatihan ketrampilan 16 orang dan terealisasi keuangan sebesar Rp 250.000.000,- atau 99,70 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
- h) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan alokasi dana sebesar Rp. 181.250.000,- untuk Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja / Job Market Fair, Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Pelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal bagi TKI Purna, jumlah yang mengikuti pelatihan ketrampilan 10 orang, Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau. % Peningkatan Pembinaan ketrampilan kerja 40 orang, Kegiatan

Pembentukan Kelompok Usaha Mandiri Sektor Industri (UMSI). Peningkatan Pembinaan Kelompok Usaha Kecil di Pedesaan 10 orang dan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK). Tingkat kesempatan kerja dan % Peningkatan TKI yang ditempatkan keluar negeri dan terealisasi keuangan sebesar Rp 180.435.600,- atau 99,55 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan.

- i) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,- untuk Kegiatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Jumlah % Kecelakaan kerja di Perusahaan, % Sengketa Kasus Tenaga Kerja yang diselesaikan dan % Peningkatan Upah Minimum Kabupaten dan Kegiatan Perlindungan Tenaga Kerja Wanita, jumlah 5 orang yang mengikuti pelatihan ketrampilan dan terealisasi keuangan sebesar Rp 40.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai Partisipasi angkatan kerja perempuan.
 - j) Program Transmigrasi Regional dengan alokasi dana sebesar Rp. 170.000.000,- untuk Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah Tujuan Transmigrasi dan Pemberangkatan Calon Transmigran, Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Regional. Pelatihan Ketrampilan Calon Transmigrasi dan Kegiatan Kunjungan Kerjasama dalam rangka penempatan transmigrasi, Terlaksananya Kerja sama Antar Daerah Penempatan Transmigrasi 1 lokasi dan terealisasi keuangan sebesar Rp 40.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai jumlah Transmigrasi Swakarsa.
- 2) Hambatan yang dihadapi beserta langkah-langkah yang telah diambil mengatasi hambatan.
- a) Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya dan manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.

- b) Penerapan prinsip nilai (transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas) tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
 - c) Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
 - d) Identifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi potensi bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
 - e) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam melaksanakan kebijakan, program kegiatan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
 - f) Desiminasi dan sosialisasi kepada sektor swasta dan masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
 - g) Pembinaan, pemberdayaan dan pendayagunaan sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan usaha di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- 3) Analisis kegiatan dalam pencapaian sasaran.

Adapun Analisa Capaian Kinerja setiap pelaksanaan kegiatan Tahun 2011 antara lain :

- a) Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya, jumlah yang mengikuti rapat koordinasi UPPKH di Tingkat Kabupaten sebanyak 17 Kecamatan dan jumlah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 29.891 KK dengan jumlah anggaran Rp 100.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 99.646.675,- atau 99,65 % dan fisik sebesar 100 %.
- b) Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial yang Berasal dari Pemerintah dan Masyarakat, jumlah masyarakat yang menerima bantuan 30 orang (3 kelompok) dengan jumlah anggaran Rp 21.750.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 21.750.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.

- c) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, jumlah data PMKS Kabupaten Lamongan dengan jumlah anggaran Rp 10.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 10.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- d) Kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia, Terlantar dan Fakir Miskin serta Keluarga Muda Mandiri, jumlah lanjut usia yang mengikuti bimbingan dan telah mendapat bantuan 20 orang dengan jumlah anggaran Rp 17.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 16.780.000,- atau 98,71 % dan fisik sebesar 100 %.
- e) Kegiatan Pemulangan / Pengiriman Kepanti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yang terjaring Rasia, jumlah wts, gepeng psikotik yang dipulangkan kedaerah asal 80 orang dengan jumlah anggaran Rp 15.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 15.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- f) Kegiatan Pemulangan Orang Terlantar Kehabisan Bekal, Kecopetan, Bantuan Transport Pengiriman Anak / Remaja dan Penyandang ke Panti Rehabilitasi Sosial, jumlah orang terlantar yang dipulangkan dan pengiriman anak remaja dan paca ke panti resos 70 orang dengan jumlah anggaran Rp 17.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 17.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- g) Kegiatan Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan bagi Anak Bermasalah, jumlah anak jalanan yang telah mendayagunakan ketrampilannya 15 orang dengan jumlah anggaran Rp 31.250.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 30.939.650,- atau 99,01 % dan fisik sebesar 100 %.
- h) Kegiatan Pemberdayaan Anak Asuh Keluarga Miskin, jumlah anak asuh yang telah mendapat sarana dan prasaran sekolah 500 anak dengan jumlah anggaran Rp 95.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 92.602.500,- atau 97,48 % dan fisik sebesar 100 %.
- i) Kegiatan Bimbingan Sosial bagi Eks Kusta, jumlah eks. Penderita kusta yang mendapat binaan dan bimbingan 10 orang dengan jumlah

anggaran Rp 10.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 9.850.000,- atau 98,50 % dan fisik sebesar 100 %.

- j) Kegiatan Operasional Pendampingan Pendataan Dana Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat, jumlah 6 orang pendamping yang mengikuti rapat dan Jumlah 247 orang penyandang cacat berat yang telah didata dana jaminan sosial dengan jumlah anggaran Rp 10.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 10.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- k) Kegiatan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat (KUBE PACA), jumlah 30 orang (2 Kube Paca) dengan jumlah anggaran Rp 10.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 9.850.000,- atau 98,50 % dan fisik sebesar 100 %.
- l) Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo, jumlah 30 orsos/panti dan Jumlah anak asuh didalam panti 1250 anak dengan jumlah anggaran Rp 681.600.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 681.104.992,- atau 99,93 %. dan fisik sebesar 100 %.
- m) Kegiatan Pemberdayaan Lansia Gerantologi dan Revitalisasi Karang Taruna, jumlah Karang Taruana yang mengikuti revitalisasi 27 Kecamatan (81 orang) dengan jumlah anggaran Rp 15.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 15.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- n) Kegiatan Pemberdayaan dan Revitalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), jumlah PSM yang mengikuti revitalisasi 54 orang dengan jumlah anggaran Rp 45.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 44.995.750,- atau 99,99 % dan fisik sebesar 100 %.
- o) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Kelompok Masyarakat di Wilayah Tembakau, jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ketrampilan 48 orang / 3 kegiatan(1 kegiatan pelatihan Servise sepeda motor = 16 orang dan 2 kegiatan pelatihan menjahit = 32 orang) dengan jumlah anggaran Rp 123.750.000,- dan terealisasi

keuangan sebesar Rp 123.750.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.

- p) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Las bagi Pencari Kerja, jumlah yang mengikuti pelatihan ketrampilan 16 orang dengan jumlah anggaran Rp 127.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 126.250.000,- atau 99,41 % dan fisik sebesar 100 %.
- q) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja / Job Market Fair dengan jumlah anggaran Rp 60.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 59.900.000,- atau 99,83 % dan fisik sebesar 100 %.
- r) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Pelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal bagi TKI Purna, jumlah yang mengikuti pelatihan ketrampilan 10 orang dengan jumlah anggaran Rp 18.750.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 18.736.000,- atau 99,93 % dan fisik sebesar 100 %.
- s) Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau. % Peningkatan Pembinaan ketrampilan kerja 40 orang dengan jumlah anggaran Rp 62.500.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 61.849.600,- atau 98,96 % dan fisik sebesar 100 %.
- t) Kegiatan Pembentukan Kelompok Usaha Mandiri Sektor Industri (UMSI). Peningkatan Pembinaan Kelompok Usaha Kecil di Pedesaan 10 orang dengan jumlah anggaran Rp 20.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 19.950.000,- atau 99,75 % dan fisik sebesar 100 %.
- u) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK). Tingkat kesempatan kerja dan % Peningkatan TKI yang ditempatkan keluar negeri dengan jumlah anggaran Rp 20.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 20.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- v) Kegiatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Jumlah % Kecelakaan kerja di Perusahaan, % Sengketa Kasus Tenaga Kerja yang diselesaikan dan % Peningkatan Upah Minimum Kabupaten dengan jumlah anggaran Rp 30.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 30.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.

- w) Kegiatan Perlindungan Tenaga Kerja Wanita, jumlah 5 orang yang mengikuti pelatihan ketrampilan dengan jumlah anggaran Rp 10.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 10.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- x) Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah Tujuan Transmigrasi dan Pemberangkatan Calon Transmigran, jumlah anggaran Rp 75.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 75.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- y) Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Regional. Pelatihan Ketrampilan Calon Transmigrasi dengan jumlah anggaran Rp 20.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 20.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- z) Kegiatan Kunjungan Kerjasama dalam rangka penempatan transmigrasi, Terlaksananya Kerja sama Antar Daerah Penempatan Transmigrasi 1 lokasi dengan jumlah anggaran Rp 75.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 75.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.

B. EVALUASI KINERJA

- 1) Evaluasi pencapaian sasaran.
 - a) Sasaran meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja dengan indikator kinerja :
 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dimana jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2011 berjumlah 14.747 orang, sedangkan jumlah penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) berjumlah 21.470 orang atau 68,69 %, Target yang diharapkan 67,20 % maka tingkat capaiannya 102,22 %.
 - Persentase Pencari Kerja yang, dimana jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2011 berjumlah 262 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang mendaftar berjumlah 974 orang atau 26,89 %, Target yang diharapkan 27,02 % maka tingkat capaiannya 99,52 %.
 - b) Sasaran pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan indikator kinerja :

- Partisipasi angkatan kerja perempuan, dimana jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2011 berjumlah 4.774 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja perempuan berjumlah 9.474 orang atau 50,39 %, Target yang diharapkan 51,83 % maka tingkat capaiannya 97,22 %.
- c) Sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial. dengan indikator kinerja :
 - Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, dimana jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan lain-lain yang terdapat di suatu daerah pada tahun 2011 berjumlah 30 buah, Target yang diharapkan 30 buah maka tingkat capaiannya 100 %.
 - Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dimana jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2011 berjumlah 39.021 orang, sedangkan jumlah PMKS yang ada berjumlah 51.784 orang atau 75,35 %, Target yang diharapkan 64,82 % maka tingkat capaiannya 116,24 %.
 - Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial, dimana jumlah PMKS yang diberikan bantuan pada tahun 2011 berjumlah 38.713 orang, sedangkan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan berjumlah 51.784 orang atau 74,76 %, Target yang diharapkan 58,52 % maka tingkat capaiannya 127,75 %.
- d) Sasaran Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian dengan indikator kinerja :
 - Transmigrasi Regional / melalui jalur transmigrasi umum, dimana jumlah transmigrasi melalui jalur transmigrasi umum pada tahun 2011 berjumlah 20 KK atau 100 %, Target yang diharapkan 20,00 % maka tingkat capaiannya 100 %.
- 2) Hambatan yang dihadapi beserta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan.

- a) Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
 - b) Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek dalam lintas bidang dan organisasi.
 - c) Bekerja secara proaktif didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
 - d) Mencermati berbagai peristiwa aktual kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan.
- 3) Analisis sasaran dalam kaitannya untuk mencapai tujuan.
- a) Sebagaimana capaian kinerja yang diuraikan diatas diharapkan bisa meningkatkan kemampuan ekonomi dan produktifitas andalan daerah.
 - b) Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

INDIKATOR	TARGET	REALISASI S/D TAHUN INI	TAHUN BERJALAN		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,20%	$\frac{14747}{21470}$	67,20%	$\frac{14747}{21470}$	68,69
1.2 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,02%	$\frac{262}{974}$	27,02%	$\frac{262}{974}$	26,90
2.1 Partisipasi angkatan kerja perempuan	51,83%	$\frac{4774}{9474}$	51,83%	$\frac{4774}{9474}$	50,39
3.1 Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	30	30	30	30	30

3.2	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	64,82%	<u>39018</u> 51784	64,82%	<u>39018</u> 51784	75,35
3.3	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial	58,52%	<u>38713</u> 51784	58,52%	<u>38713</u> 51784	74,76
4.1	Transmigrasi Swakarsa	20,00%	<u>20</u> 20	20,00%	<u>20</u> 20	100

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang digunakan untuk mendukung dan mewujudkan pencapaian sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2011, adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH DANA RP	REALISASI RP	SIASA RP	%
1	2	3			4
	BELANJA DAERAH	4.418.899.000,-	4.339.806.930,-	79.092.070,-	98,21
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.253.465.000,-	2.186.429.191,-	67.035.809,-	97,03
1	Belanja Pegawai	2.253.465.000,-	2.186.429.191,-	67.035.809,-	97,03
II	BELANJA LANGSUNG	2.165.434.000,-	2.153.377.739,-	12.056.261,-	99,44
	SOSIAL	1.078.600.000,-	1.074.519.567,-	4.080.433,-	92,62
1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	100.000.000,-	99.646.675,-	353.325,-	99,65
2	Fasilitas Bantuan Sosial yang Berasal dari Pemerintah dan Masyarakat	21.750.000,-	21.750.000,-	-	100
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10.000.000,-	10.000.000,-	-	100
4	Pemberdayaan Lanjut Usia, Terlantar dan Fakir Miskin serta Keluarga Muda Mandiri	17.000.000,-	16.780.000,-	220.000,-	98,71
5	Pemulangan / Pengiriman Kepanti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yang terjaring Rasia	15.000.000,-	15.000.000,-	-	100

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

6	Pemulangan Orang Terlantar Kehabisan Bekal, Kecopetan, Bantuan Transport Pengiriman Anak / Remaja dan Penyandang ke Panti Rehabilitasi Sosial	17.000.000,-	17.000.000,-	-	100
7	Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan bagi Anak Bermasalah	31.250.000,-	30.939.650,-	310.350,-	99,01
8	Pemberdayaan Anak Asuh Keluarga Miskin	95.000.000,-	92.602.500,-	2.397.500,-	97,48
9	Bimbingan Sosial bagi Eks Kusta	10.000.000,-	9.850.000,-	150.000,-	98,50
10	Operasional Pendampingan Pendataan Dana Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat	10.000.000,-	10.000.000,-	-	100
11	Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat (KUBE PACA)	10.000.000,-	9.850.000,-	150.000,-	98,50
12	Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo	681.600.000,-	681.104.992,-	495.008,-	99,93
13	Pemberdayaan Lansia Gerantologi dan Revitalisasi Karang Taruna	15.000.000,-	15.000.000,-	-	100
14	Pemberdayaan dan Revitalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	45.000.000,-	44.995.750,-	4.250,-	99,99
KETENAGAKERJAAN		916.834.000,-	908.858.172,-	7.975.828,-	99,13
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,-	2.000.000,-	-	100
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.250.000,-	51.271.457,-	4.978.543,-	91,15
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	-	100
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	4.900.000,-	4.500.500,-	399.500,-	91,85
19	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.000.000,-	24.000.000,-	-	100
20	Penyediaan Alat Tulis Kantor	72.750.000,-	72.300.000,-	450.000,-	99,38
21	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000,-	45.000.000,-	-	100
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,-	15.000.000,-	-	100
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	-	100
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,-	5.000.000,-	-	100

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

25	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000,-	15.000.000,-	-	100
26	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50.000.000,-	50.000.000,-	-	100
27	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan, Tenaga Honorer / Kontrak	28.934.000,-	28.350.615,-	583.385,-	97,98
28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50.000.000,-	50.000.000,-	-	100
29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	18.000.000,-	18.000.000,-	-	100
30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	18.000.000,-	18.000.000,-	-	100
31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	-	100
32	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,-	5.000.000,-	-	100
33	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-	-	100
34	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000,-	5.000.000,-	-	100
35	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000,-	5.000.000,-	-	100
36	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Kelompok Masyarakat di Wilayah Tembakau (Alokasi Dana Cukai)	123.750.000,-	123.750.000,-	-	100
37	Pelatihan Ketrampilan Las bagi Pencari Kerja	127.000.000,-	126.250.000,-	750.000,-	99,41
38	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja / Job Market Fair	60.000.000,-	59.900.000,-	100.000,-	99,83
39	Pengembangan Kelembagaan dan Pelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal bagi TKI Purna	18.750.000,-	18.736.000,-	14.000,-	99,93
40	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat dilingkungan Industri Tembakau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (Alokasi Dana Cukai)	62.500.000,-	61.849.600,-	650.400,-	98,96
41	Pembentukan Kelompok Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI)	20.000.000,-	19.950.000,-	50.000,-	99,75
42	Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK)	20.000.000,-	20.000.000,-	-	100
43	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	30.000.000,-	30.000.000,-	-	100
44	Perlindungan Tenaga Kerja	10.000.000,-	10.000.000,-	-	100

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	Wanita				
	KETRANSMIGRASIAN	170.000.000,-	169.549.950,-	450.050,-	99,74
	45 Penyuluhan Transmigrasi Regional	75.000.000,-	75.000.000,-	-	100
	46 Pelatihan Transmigrasi Regional	20.000.000,-	20.000.000,-	-	100
	47 Kunjungan Kerja Sama dalam rangka Penempatan Transmigrasi	75.000.000,-	75.000.000,-	-	100

Tabel IV : Data Keuangan Sumber Dana dari APBD Tahun 2011.

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011 adalah merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dibidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam LAKIP Tahun 2011 ini, masih terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Keberhasilan dan Kegagalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan media pertanggungjawaban Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan terhadap hasil penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga dapat disimpulkan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan secara umum merupakan penjabaran RENSTRA TAHUN 2011-2015 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan dan Rencana Kegiatan Tahun 2011 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan, baik terkait indikator sasaran maupun indikator kinerja yang termuat dalam 5 (lima) Misi, 17 (tujuh belas) Sasaran dan 10 (sepulu) Program diperoleh capaian Sasaran dengan rata-rata prosentase sebesar 98,21 % (Sangat Baik / Sangat Berhasil), dibanding Tahun 2010 sebesar 98,57 %, walaupun terdapat penurunan sebesar -0,36 %. Dari segi alokasi anggaran pada tahun 2011 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan terdapat kenaikan sebesar 11,68 %.

2. Permasalahan dan Kendala Utama yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja*

- 1) Pemenuhan program dan kegiatan target kinerja RENSTRA 2011-2015 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan yang belum tercapai;
- 2) Peningkatan efektifitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- 3) Penanganan bencana, pengurangan resiko bencana dan peningkatan pemberantasan penyakit menular;
- 4) Santunan kepada Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Tuna Sosial, Gelandangan, Pengemis dan Bekas Narapidana masih belum memadai.
- 5) Fasilitas peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada tokoh masyarakat, LSM dan PMKS yang berpotensi melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan masih terbatas.
- 6) Pemberian bantuan penanggulangan bencana masih belum optimal.
- 7) Sarana dan prasarana pemberdayaan generasi muda masih belum memadai.
- 8) Fasilitas penyelenggaraan panti sosial untuk kegiatan usaha produktif belum tercukupi.
- 9) Fasilitas Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan kurang memadai.
- 10) Fasilitas Informasi Pasar Kerja dan kesempatan kerja masih belum memadai.
- 11) Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penagakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja masih belum optimal.
- 12) Keterbatasan dukungan dana dan fasilitas.
- 13) Pencepatan pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Pembangunan Pedesaan;

3. Strategi Pemecahan Masalah untuk tahun mendatang.

Berdasarkan kajian evaluasi kinerja LAKIP Tahun 2011 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan, agar di tahun mendatang

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

peningkatan kinerja lebih meningkat lagi capaiannya guna lebih mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka terhadap program-program yang telah ditetapkan dan dianggarkan khususnya terkait kebutuhan dasar masyarakat (sebagaimana RPJMD 2011 – 2015), disarankan perencanaannya lebih dimantapkan sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Lamongan, Januari 2012

**KEPALA DINAS
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN**



Dr. IMAM TRISNO EDY, MM.

Pembina Utama Muda.

NIP. 19590407 198503 1 015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Rencana Strategik (RS)
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Penetapan Kinerja (PK)
- Pengukuran Kinerja

RENCANA STRATEGIK

Tahun 2011

INSTANSI : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMONGAN

VISI : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL, TERCIPTANYA TENAGA KERJA YANG BERKUALITAS, KESEMPATAN KERJA, HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS, PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG BERKEADILAN DAN MOBILITAS PENDUDUK YANG MANDIRI.

MISI 1 : MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG ASPIRATIF, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN.

MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN KUALITAS KELUARGA MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA.

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DAN KESEMPATAN KERJA.

MISI 4 : MENINGKATKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

MISI 5 : MENINGKATKAN MOBILITAS PENDUDUK DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDUDUK

Hal 1

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
1 Meningkatnya kemampuan ekonomi dan produktifitas andalan daerah	1.1 Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja 1.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 1.1.2 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan 1.2.1 Partisipasi angkatan kerja perempuan	Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Peningkatan Kwalitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 2 Peningkatan Kesempatan Kerja 3 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	

2 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	2.1 Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial.	2.1.1 Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 2.1.2 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2.1.3 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial	Meningkatkan Kualitas Hidup bagi PMKS dengan Peningkatan Rehabilitas dan Bantuan Dasar Kesejahteraan Sosial	4 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 5 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6 Pembinaan Anak Terlantar 7 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 8 Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 9 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
---	---	--	--	--	--

	3.1 Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian	3.1.1 Transmigrasi Swakarsa	Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah Tujuan Transmigrasi dan Pemberangkatan Calon Transmigrasi yang sudah dilatih	10 Transmigrasi Regional	
--	---	-----------------------------	--	--------------------------	--

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tahun 2011

INSTANSI : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMONGAN

Hal 1

Hal 1

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	TARGE		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
1 Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,20%	Peningkatan Kwalitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan Ketrampilan Kerja bagi Kelompok Masyarakat di Wilayah Tembakau	Input	Rp	123.750.000	
					Output			
					Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ketrampilan	orang	48	
				Pelatihan Ketrampilan Las bagi Pencari Kerja	Input	Rp	127.000.000	
					Output			
					Jumlah yang mengikuti pelatihan ketrampilan Las	orang	16	
	1.2 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,02%	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja / Job Market Fair	Input	Rp	60.000.000	
					Output			
					% Penyebarluasan Informasi Kesempatan Kerja di Perusahaan	kegiatan	1	
					% Penyebarluasan Informasi bagi Pencari Kerja di Perusahaan		1	

				Pengembangan Kelembagaan dan Pelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal bagi TKI Puma	Input	Rp	18.750.000	
					Output			
					% Peningkatan Pembinaan Usaha Kecil di Pedesaan bagi TKI Puma	kegiatan	1	
				Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di Wilayah Tembakau	Input	Rp	62.500.000	
					Output			
					% Peningkatan Pembinaan ketrampilan kerja	kegiatan	1	
				Pembentukan Kelompok Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI)	Input	Rp	20.000.000	
					Output			
					Jumlah Kelompok UMSI	orang	10	
				Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK)	Input	Rp	20.000.000	
					Output			
					%Tingkat kesempatan kerja	kegiatan	1	
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.1 Partisipasi angkatan kerja perempuan	51,83%	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Input	Rp	30.000.000	
					Output			
					% Indeks jumlah kecelakaan kerja di dalam perusahaan	kegiatan	1	

					% Jumlah sengketa kasus tenaga kerja yang diselesaikan			
					% Peningkatan UMK			
				Perlindungan Tenaga Kerja Wanita	Input	Rp	10.000.000	
					Output			
					% Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja Wanita	kegiatan	1	
3 Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial.	3.1 Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	30	Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo	Input	Rp	681.600.000	
					Output			
					Jumlah orsos/panti	panti	30	
					Jumlah anak asuh didalam panti	anak	1.250	
	3.2 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	64,82%	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Input	Rp	100.000.000	
					Output			
					Jumlah yang mengikuti rapat koordinasi UPPKH di Tk. Kabupaten dan Kecamatan	kecamatan	20	
					Jumlah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	KK	29.891	

			Fasilitas Bantuan Sosial yang Berasal dari Pemerintah dan Masyarakat	Input	Rp	21.750.000	
				Output			
				Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan ketrampilan	orang	30	
			Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input	Rp	10.000.000
				Output			
				% Jumlah TKSK yang mengirimkan data PMKS	1 buku		
			Pemberdayaan Lanjut Usia, Terlantar dan Fakir Miskin serta Keluarga Muda Mandiri	Input	Rp	17.000.000	
				Output			
				Jumlah lanjut usia yang mengikuti bimbingan dan telah mendapat bantuan	orang	20	
			Pemulangan / Pengiriman Kepanti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yang terjaring Rasia	Input	Rp	15.000.000	
				Output			
				Jumlah wts, gepeng psikotik yang dipulangkan kedaerah asal	orang	105	
			Pemulangan Orang Terlantar Kehabisan Bekal, Kecopetan, Bantuan Transport Pengiriman Anak / Remaja dan Penyandang ke Panti Rehabilitasi Sosial	Input	Rp	17.000.000	
				Output			
				Jumlah orang terlantar yang dipulangkan dan pengiriman anak remaja dan paca ke panti resos	orang	70	

	3.3 Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial	58,52%	Pembinaan Anak Terlantar	Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan bagi Anak Bermasalah	Input	Rp	31.250.000	
					Output			
					Jumlah anak jalanan yang telah mendayagunakan ketrampilannya	orang	15	
				Pemberdayaan Anak Asuh Keluarga Miskin	Input	Rp	95.000.000	
					Output			
					Jumlah anak asuh yang telah mendapat sarana dan prasarana sekolah	anak	500	
			Pembinaan Para Penyanggah Cacat dan Trauma	Bimbingan Sosial bagi Eks Kusta	Input	Rp	10.000.000	
					Output			
					Jumlah eks. Penderita kusta yang mendapat binaan dan bimbingan	orang	10	
				Operasional Pendampingan Pendataan Dana Jaminan Sosial bagi Penyanggah Cacat Berat	Input	Rp	10.000.000	
					Output			
					Jumlah orang pendamping yang mengikuti rapat koordinasi	orang	6	
					Jumlah penyanggah cacat berat yang telah didata dana jaminan sosial	orang	244	

				Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat (KUBE PACA)	Input	Rp	10.000.000	
					Output			
					Jumlah KUBE PACA yang dibina	KUBE	2	
			Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Lansia Gerantologi dan Revitalisasi Karang Taruna	Input	Rp	15.000.000	
					Output			
					Jumlah Karang Taruna yang mengikuti revitalisasi	81 orang		
				Pemberdayaan dan Revitalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Input	Rp	45.000.000	
					Output			
					Jumlah PSM yang mengikuti revitalisasi	54 orang		
4 Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian	4.1 Transmigrasi Swakarsa	20,00%	Transmigrasi Regional	Penyuluhan Transmigrasi Regional	Input	Rp	75.000.000	
					Output			
					Penyuluhan tentang Kerja sama Antar Daerah dan Pemberangkatan Transmigrasi	kegiatan	1	
				Pelatihan Transmigrasi Regional	Input	Rp	20.000.000	
					Output			
					Pelatihan Ketrampilan Calon Transmigrasi	orang	15	

				Kunjungan Kerjasama dalam rangka penempatan transmigrasi	Input	Rp	75.000.000	
					Output			
					Terlaksananya Kerja sama Antar Daerah Penempatan Transmigrasi	orang	13	

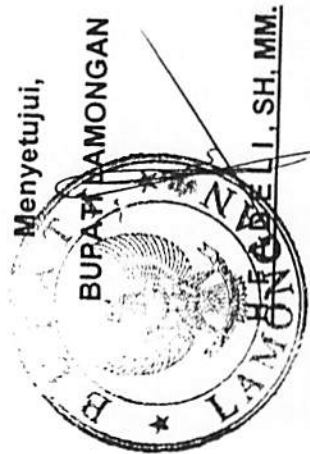


**PENETAPAN KINERJA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2011 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun Anggaran 2011.

Menyetujui,



Lamongan, 20 Januari 2011.

KEPALA DINAS
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. SONI HARSONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19551205 198003 1 017.

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMONGAN

Hal 1

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR UTAMA		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	8
	SOSIAL				
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1.1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	1.1.1 Jumlah yang mengikuti rapat koordinasi UPPKH di Tk. Kabupaten dan Kecamatan	20 orang	100,000,000
			1.1.2 Jumlah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	29.891 KK	
		1.2 Fasilitas Bantuan Sosial yang berasal dari Pemerintah dan Masyarakat (Pemberdayaan Masyarakat Miskin Daerah Terpencil)	1.2.1 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Daerah Terpencil	30 orang	21,750.000
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2.1.1 Tersedianya Data PMKS dan PSKS	1 buku	10,000,000
		2.2 Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar dan Fakir Miskin serta Keluarga Muda Mandiri di Wilayah Tembakau	2.2.1 Jumlah lanjut usia yang mengikuti bimbingan dan telah mendapat bantuan	10 orang	17,000,000

		2.3 Pemulangan Pengiriman ke panti rehabilitasi sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yang terjerang	2.3.1 Jumlah wts, gepeng psikotik yang dipulangkan ke daerah asal	80 orang	15,000,000
		2.4 Pemulangan orang terlantar, kehabisan bekal, kecopetan	2.4.1 Jumlah orang terlantar, kehabisan bekal dan kecopetan yang dipulangkan ke daerah asal	70 orang	10,000,000
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	3.1 Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan bagi Anak Bermasalah di Wilayah Tembakau	3.1.1 Jumlah anak jalanan yang mengikuti pelatihan ketrampilan	15 orang	31,250,000
		3.2 Pemberdayaan Anak Asuh Keluarga Miskin	3.2.1 Jumlah anak asuh yang telah mendapat sarana dan prasarana sekolah	500 anak	80,000,000
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	4.1 Bimbingan Sosial bagi Eks. Kusta	4.1.1 Jumlah eks. Penderita kusta yang mendapat binaan dan bimbingan	11 orang	10,000,000
		4.2 Operasional Pendampingan, Pendataan Dana Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat	4.2.1 Jumlah orang pendamping yang mengikuti rapat koordinasi	6 orang	10,000,000
			4.2.2 Jumlah penyandang cacat berat yang telah didata dan terkoordinir	247 orang	
		4.3 Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat (KUBE PACA)	4.3.1 Pembinaan bagi KUBE PACA	2 kelompok	10,000,000

5	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	5.1 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo	5.1.1 Jumlah orsos/panti	30 orsos/panti	681,600,000
			5.1.2 Jumlah anak asuh didalam panti	1250 anak	
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	6.1 Pembinaan Lansia Gerontologi dan Revitalitas Karang Taruna	6.1.1 Jumlah Karang Taruna yang mengikuti revitalisasi	81 orang	15,000,000
		6.2 Pemberdayaan dan Revitalitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	6.2.1 Jumlah PSM yang mengikuti revitalisasi	54 orang	10,000,000
KETENAGAKERJAAN					
7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.1 Pendidikan dan Ketrampilan Kerja bagi Kelompok Masyarakat di Wilayah Tembakau	7.1.1 Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ketrampilan	48 orang	123,750,000
		7.2 Pelatihan Ketrampilan Las bagi Pencari Kerja	7.2.1 Jumlah yang mengikuti Pelatihan Ketrampilan Las bagi Pencari Kerja		127,000,000
8	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	8.1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja / Job Market Fair	8.1.1 % Penyebarluasan Informasi Kesempatan Kerja di Perusahaan	97%	60,000,000
			8.1.2 % Penyebarluasan Informasi bagi Pencari Kerja di Perusahaan	97%	

	8.2 Pengembangan Kelembagaan, Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan Industri Sumber dana bagi hasil cukai	8.2.1 % Peningkatan Pembinaan Usaha Kecil Sektor Informal	10 orang	18,750,000
	8.3 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Sumber dana bagi hasil cukai	8.3.1 % Peningkatan Pembinaan keterampilan kerja	25 orang	62,500,000
	8.4 Pembentukan Kelompok Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) Sumber dana bagi hasil cukai	8.4.1 Peningkatan Pembinaan Kelompok Usaha Kecil di Pedesaan	10 orang	20,000,000
	8.5 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) Sumber dana bagi hasil cukai	8.5.1 % Tingkat Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) Sumber dana bagi hasil cukai	97%	20,000,000
		8.5.2 % Peningkatan TKI yang ditempatkan keluar negeri	97%	
9	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	9.1 Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	9.1.1 Indek Jumlah Kecelakaan kerja di Perusahaan	97% 30,000,000
			9.1.2 Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja yang dapat diselesaikan	97%
			9.1.3 Terlaksananya Pembahasan Usulan dan Penetapan UMK	97%
	9.2 Perlindungan Tenaga Kerja Wanita	9.2.1 Jumlah yang mengikuti Pelatihan Keterampilan	5 orang	10,000,000

KETRANSMIGRASIAN					
10	Transmigrasi Regional	10.1 Penyuluhan Transmigrasi Regional	10.1.1 Kerja sama Antar Daerah dan Pemberangkatan Transmigrasi	75%	75,000,000
		10.2 Pelatihan Transmigrasi Regional	10.2.1 Pelatihan Ketrampilan Calon Transmigrasi	75%	20,000,000
		10.3 Kunjungan Kerjasama dalam rangka penempatan transmigrasi	10.3.1 Terlaksananya Kerja sama Antar Daerah Penempatan Transmigrasi	1 kegiatan	75,000,000

Lamongan, 20 Januari 2011.

**KEPALA DINAS
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMONGAN**

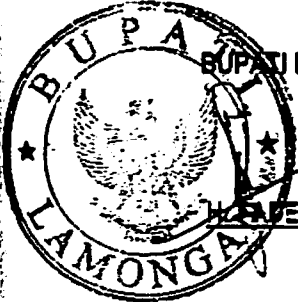

Drs. SONI HARSONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19551205 198003 1 017.

Menyetujui,

BUPATI LAMONGAN


H. ADEL, SH. MM.

PENGUKURAN KINERJA

Tahun 2011

INSTANSI : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN STARATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1 Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,20%	68,69%	102,22
	1.2 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,02%	26,89%	99,52
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.1 Partisipasi angkatan kerja perempuan	51,83%	50,39%	97,22
3 Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial.	3.1 Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	30	30	100
	3.2 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	64,82%	75,35%	116,24
	3.3 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial	58,52%	74,76%	127,75
4 Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian	4.1 Transmigrasi Regional	20,00%	20,00%	100

Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp 1.720.600.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp 1.714.955.167